

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN CALON PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR PIP MENGGUNAKAN METODE
MOORA STUDI KASUS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG BERBASIS WEB**

SKRIPSI



OLEH:

HAYATUL VICHRI

20101152610237

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
PADANG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pendidikan secara tunai yang diberikan kepada anak sekolah usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu dimana Program Indonesia Pintar (PIP) dibuat pada akhir tahun 2014 oleh pemerintah dan menjadikan Program ini menjadi bagian penyempurnaan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Sering sekali ditemukan masalah pendidikan sekolah yang terjadi dimana masih banyak ditemukan kasus siswa dengan usia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya sehingga untuk menyetasnya pemerintah pusat meluncurkan Program Indonesia Pintar melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Program Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin terutama di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang.

Masalah yang dihadapi pihak sekolah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang adalah ketidak tepatannya dalam mendata siswa-siswi dan terdapat banyak kriteria yang harus diperhitungkan dimana masih banyak kriteria siswa yang tidak memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar) sehingga pihak sekolah kesulitan dalam menentukan prioritas siswa miskin yang ingin didaftarkan sebagai penerima bantuan PIP. Dalam menjamin dan memastikan anak mendapatkan bantuan PIP maka diberi sebuah penanda/identitas yaitu berupa kartu yang dibuat sebagai KIP (Kartu Indonesia Pintar) apabila anak telah terdaftar.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang, membutuhkan sistem pendukung keputusan (SPK) untuk memprioritaskan masyarakat kurang mampu untuk menerima bantuan dari program tersebut.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi interatif yang menyediakan informasi, pemodelan dan pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat

Pada saat melakukan riset di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang, penulis menemukan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang paling dominan yaitu, penerima program PIP tidak merata masih banyak siswa-siswi yang tidak mampu atau miskin belum mendapatkan bantuan dari program ini dan masih ditemukan adanya kepesertaan yang tidak layak (siswa-siswi mampu) ternyata mendapatkan bantuan PIP.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pemberian PIP kepada siswa-siswi di sekolah yang ada di Kota Padang, maka perlu dibangun suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menerapkan metode perankingan yang dapat mempermudah menentukan siswa-siswi yang layak menerima PIP dalam pemanfaatan beberapa metode untuk mencari alternatif solusi metode yang dipilih adalah menggunakan metode *Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis* (MOORA) karena metode MOORA lebih efisien dan waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat dan mudah.

Multi-Objective Optimization on The Basic of Ratio Analysis (MOORA) adalah sistem dengan multi-objektif, yang di dalamnya memiliki dua atau lebih atribut yang saling bertentangan. MOORA melakukan optimalisasi terhadap atribut-atribut tersebut dengan menerapkan perhitungan matematika yang kompleks, sehingga didapatkan keluaran berupa pemecahan masalah yang diinginkan. Metode ini melakukan pemisahan subjektifitas dari suatu proses penilaian ke bentuk kriteria berbobot dengan beberapa atribut pengambilan keputusan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Metode ini juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengolahan variabelnya (Rosita dkk, 2020).

Penelitian ini menggunakan metode MOORA karena merupakan salah satu metode penyelesaian multi kriteria, dimana dalam pemberian PIP mempunyai banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berupaya memecahkan hal tersebut dengan mengambil permasalahan yang berjudul: **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN CALON PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PIP MENGGUNAKAN METODE MOORA (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang) BERBASIS WEB”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancangan dan membangun sistem pendukung keputusan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) menggunakan metode MOORA?
2. Bagaimana implementasi metode MOORA pada sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima Program Indonesia Pintar (PIP)?

3. Bagaimana proses menghitung penyeleksian penerima Program Indonesia Pintar (PIP) didalam sistem pendukung keputusan?

1.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat membantu dalam penyeleksian penerima Program Indonesia Pintar (PIP) secara tepat, serta mendapatkan keputusan siswa-siswi yang layak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) secara tepat dan akurat.
2. Diharapkan dengan adanya sistem pendukung keputusan permasalahan yang ada di Kota Padang tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat.
3. Diharapkan dengan diterapkannya perancangan desain aplikasi menggunakan bahasa pemograman PHP dalam proses pengolahan data keputusan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Padang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat serta data yang telah diperhitungkan tersimpan baik dalam database MySQL.

1.4. Batasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Sistem pendukung keputusan yang akan dirancang dan dibangun adalah sistem pendukung keputusan menggunakan metode *MOORA* yang membantu

memberikan alternatif terbaik dalam penyeleksian penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

2. Penggunaan metode MOORA untuk menyeleksi alternatif terbaik agar diperoleh siswa-siswi yang layak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima Program Indonesia Pintar (PIP) akan dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta MySQL sebagai database.

1.5. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarahkan dengan baik maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima Program Indonesia Pintar (PIP) menggunakan metode MOORA.
2. Mengetahui hasil implementasi metode MOORA pada sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dibangun agar dapat mempermudah sebuah pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.

1.6. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarahkan dengan baik maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktikan.
- b. Melatih rasa bertanggung jawab dan disiplin dalam melakukan pekerjaan yang diamanatkan.
- c. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan.
- d. Melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah.
- e. Serta sebagai bahan acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya.

2. Bagi Fakultas Ilmu Komputer

- a. Menjalin kerjasama antara instansi dengan universitas untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.
- b. Membuat hubungan baik dengan instansi atau perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh masyarakat.
- c. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan menerapkannya dalam dunia kerja.
- d. Sebagai bahan evaluasi terhadap praktikum yang diterapkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi.

3. Bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang

- a. Membantu Dinas Pendidikan dalam pemilihan calon penerima PIP secara komputerisasi dan akurat sehingga kegiatan pengelolaan dapat berjalan secara efisien.

1.7. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang merupakan salah satu instansi milik negara yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang memiliki tugas dan peran yang sangat penting untuk negara dalam mengelola pendidikan dan kebudayaan.

1.7.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mendeskripsikan sebuah kerangka dan susunan hubungan antara fungsi, bagian atau posisi, yang menentukan tingkatan organisasi serta struktur menjadi tempat untuk pelaksanaan otoritas, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan yang memberikan kestabilan secara terus menerus yang dapat memungkinkan organisasi tetap hidup serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Adapun struktur organisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang adalah sebagai berikut:



Sumber : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

1.7.2. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dari struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.
- b. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang sosial.
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Pusat serta melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan kebijakan teknis operasional di lingkungan Pusat.
- b. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran.
- c. Pelaksanaan seleksi dan pengembangan.

3. Sekretariat

- a. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan.
- b. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas.
- c. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangan Dinas.

4. Sub Bagian Umum

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas.
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.

- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.

5. Sub Bagian Kepegawaian

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.
- b. . Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.

6. Sub Bagian Keuangan

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.
- b. . Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.

7. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- a. Pelaksanaan pengaturan dan penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis PAUD dan DIKMAS.
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu dan kurikulum PAUD dan DIKMAS.

8. Bidang Pendidikan Dasar

- a. Pelaksanaan pengaturan, penataan dan pembinaan kelembagaan pendidikan dasar.

- b. Pelaksanaan pendataan kelembagaan dan pengembangan teknis pendidikan dasar.
- c. Pelaksanaan upaya - upaya dalam meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan dasar.

9. Bidang Penjaminan Mutu

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Lembaga Penjaminan Mutu.
- b. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, tonggak-tonggak capaian di bidang penjaminan mutu.
- c. Memimpin penerapan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.

10. Bidang Sarana, Prasarana dan Aset

- a. Melaksanakan pelayanan dan urusan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan, sarana, prasarana, dan perlengkapan di lingkungan pendidikan.
- b. Mengorganisir dan mengurus persuratan, pengarsipan, dan kerumahtanggaan di lingkungan pendidikan.
- c. Mengerjakan urusan surat-menyurat, antara lain mengelola surat masuk/keluar, mengetik dan menggandakan surat dinas/dokumen, serta mendistribusikan surat dinas kepada unit kerja/ instansi lain.

11. Bidang Kebudayaan

- a. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah dan permuseuman.
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan.

c. Pelaksanaan pengembangan potensi bidang kebudayaan.